

DINAMIKA INTEGRASI SOSIAL DI PAPUA FENOMENA MASYARAKAT FAKFAK DI PROVINSI PAPUA BARAT

Saidin Ernas

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon
Email: ernassaid@gmail.com

Heru Nugoro

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

Zuly Qodir

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

This paper aims to explain that the social dynamics in Papua does not always present the story of conflict and disintegration, but also about the social integration, harmony, and peace as can be observed in the Fakfak community in West Papua Province. By using the methods of descriptive analysis of the qualitative data collected from field observations, interviews and documentation studies, the authors managed to formulate several important findings. First, the results of acculturation between religious values and culture are important elements that make the social norms of harmonious and tolerant in Fakfak, as described in the local knowledge of "the three furnaces stone". Second, the institutionalization of values and social integration processes in the community can work well, if the support of local forces and civil society groups work together to promote peace. At the same time, this paper also reminds that the conflict issues, such as religious radicalism and separatism, if not handled carefully can potentially damage the social integration that has been well maintained.

Keywords: *Social integration, Harmony, Peace.*

ABSTRAK

Paper ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa dinamika sosial kemasyarakatan di Papua ternyata tidak selalu menghadirkan cerita tentang konflik dan disintegrasi, tetapi juga tentang integrasi sosial serta harmoni dan perdamaian sebagaimana yang dapat diamati pada masyarakat Fakfak di Prop. Papua Barat. Dengan menggunakan metode *deskriptif analysis* terhadap data-data kualitatif yang dikumpulkan dari observasi lapangan, wawancara dan studi dokumentasi, penulis berhasil merumuskan beberapa temuan penting. *Pertama*, hasil akulturasi antara nilai-nilai agama dan budaya merupakan elemen penting yang melahirkan norma-norma sosial yang harmonis dan toleran di Fakfak, seperti yang tergambarkan dalam kearifan lokal *satu tungku tiga batu*. *Kedua*, pelebagaan nilai dan proses integrasi sosial dalam masyarakat bisa berjalan dengan baik, bila mendapat dukungan dari kekuatan-kekuatan lokal, dan kelompok *civil society* yang saling bekerjasama untuk mempromosikan perdamaian. Bersamaan dengan itu, tulisan ini juga mengingatkan bahwa isu-isu konflik, seperti separatisme dan

radikalisme agama, bila tidak ditangani dengan hati-hati bisa berpotensi merusak integrasi sosial yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Kata Kunci: *Integrasi sosial, Harmoni, Perdamaian.*

PENGANTAR

Sejauh ini studi tentang perdamaian di Papua masih dilihat sebagai sesuatu yang kurang menarik karena dianggap keluar dari opini dominan yang telah menempatkan Papua sebagai salah satu wilayah konflik paling panas di Indonesia. Para peneliti ilmu sosial dan dunia akademik seakan terjebak pada diskursus konflik yang cenderung hegemonik itu. Berbagai penelitian tentang Papua lebih banyak menyoroiti dinamika konflik dan kekerasan semata (CSIS, 2006, LIPI, 2009), dibandingkan mempelajari secara mendalam kondisi-kondisi yang spesifik dari masing-masing daerah di Papua. Orang Papua masih dilihat sebagai objek yang diam atau tidak punya prakarsa untuk menggagas perdamaian. Rentetan konflik politik, sosial dan ekonomi yang memanjang sejak sejarah integrasi Papua dengan Indonesia, dikonstruksikan sebagai narasi dominan yang memperlihatkan kesulitan untuk membangun perdamaian Papua berdasarkan inisiatif lokal. Padahal masyarakat Papua pada dasarnya memiliki kekuatan dari dalam untuk mengelola konflik sosial dan kekerasan dengan cara-cara lokal yang kemudian terbukti sukses mengendalikan konflik dan kekerasan sebagaimana yang terjadi di wilayah Fakfak Papua Barat.

Situasi harmonis di Fakfak dan sekitarnya menunjukkan bahwa terdapat dinamika konflik dan integrasi yang terjadi secara berbeda pada setiap wilayah di Papua. Pada kasus Fakfak, integrasi sosial dapat berjalan dengan baik karena dibangun secara kultural di atas kesadaran dan inisiatif lokal, sehingga memiliki makna dan kekuatan dari dalam untuk merawat keragaman, baik keragaman agama, budaya, maupun perbedaan kepentingan ekonomi dan politik. Hal ini berbeda dengan konsepsi

integrasi sosial yang selama ini dipahami dan dipraktikkan selama kurun waktu kekuasaan Orde Baru (1971-1998). Keragaman di dalam masyarakat selalu dipersepsikan sebagai sumber konflik yang mesti ditangani dengan cara-cara yang hegemonik, yaitu melakukan penyeragaman dengan memaksakan identitas nasional yang tunggal.

Model integrasi sosial yang dipaksakan melalui berbagai instrumen kekuasaan, tentu menafikkan kemungkinan adanya nilai-nilai tertentu yang mampu mendorong masyarakat untuk mengelola perbedaan dengan cara-cara yang tepat, sehingga melahirkan integrasi dan harmoni sosial yang otentik dalam masyarakat. Pada banyak kasus, masyarakat di berbagai daerah berhasil membangun dan menciptakan harmoni sosial melalui mekanisme kultural yang dibangun di atas norma-norma, nilai-nilai, dan moralitas budaya yang mengikat mereka dalam keseimbangan. Sebut saja misalnya tradisi *Bela Baja* di Pantar Nusa Tenggara Timur yang menjadi pengikat persaudaraan antara umat Islam dan Kristen (Rita Pranawati, 2011). Tradisi *Pela Gandong* di Maluku Tengah yang membantu proses penyelesaian konflik di Maluku (Ernas, 2006). Demikian juga tradisi *Satu Tungku Tiga Batu* di Fakfak Papua Barat (Iribaram, 2011). Akan tetapi, berbagai kearifan lokal tersebut masih dipandang sebelah mata karena dianggap tidak cukup kuat dan teruji untuk menyelesaikan konflik. Cara pandang seperti ini menyebabkan pemerintah cenderung mengabaikan cara-cara lokal dalam penyelesaian konflik di Indonesia.

Kecenderungan tentang adanya kemampuan lokal atau cara-cara "dari dalam" untuk memecahkan persoalan keragaman sangat dibutuhkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang majemuk dewasa ini. Kecenderungan ini menurut Irwan Abdullah memperlihatkan dua hal penting. *Pertama*, peneliti dan dunia akademik belum berhasil memetakan kemampuan masyarakat dalam mengantisipasi konflik yang dalam banyak catatan etnografis menunjukkan bahwa penduduk suku-suku

di berbagai tempat dengan penuh kesadaran menumbuhkan sensitivitas mereka dalam mengidentifikasi bahaya yang mengancam. *Kedua*, belum banyak diketahui tentang cara-cara yang dikembangkan dalam mengetahui konflik di berbagai tempat, walaupun hal ini memperlihatkan kemandirian masyarakat (*local*) di dalam memecahkan konflik. Ketiadaan kesadaran semacam ini tentu menjauhkan publik dari usaha-usaha pemecahan konflik yang bersifat substansial dan mandiri (Abdullah, 2008:6).

Hal ini, misalnya dapat diamati secara jelas dalam proses penanganan masalah-masalah di Papua yang berlangsung selama ini. Pemerintah cenderung mengedepankan proses politik dan kekuasaan dan mengabaikan inisiatif-inisiatif lokal. Padahal konflik Papua merupakan jenis konflik yang telah berkembang dengan dinamika yang sangat kompleks. Dari masalah historis yang berkaitan dengan proses integrasi Papua kedalam NKRI yang oleh Jacques Bernard (2004:135), disebut sebagai "*the late integration* (proses integrasi yang terlambat), hingga soal kegagalan pembangunan, diskriminasi sosial, dan kekerasan politik dan pelanggaran HAM (Widjoyo, 2009:3-19). Kegagalan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang saling terkait dengan politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama di Papua, semestinya mendorong untuk mengkaji berbagai alternatif lain dalam menyelesaikan masalah Papua. Pada dimensi tertentu dapat belajar dari fenomena damai dan harmonis yang terjadi di Fakfak dan sekitarnya, di mana perdamaian dan harmonisasi melibatkan masyarakat dan nilai-nilai lokal yang mengikat mereka dalam keseimbangan, sehingga relasi sosial yang terbentuk adalah keberadaan (ko-eksistensi), kerjasama (kolaborasi) dan kerekatan (kohesi) yang membentuk integrasi sosial. Apa yang terjadi di Fakfak tentu sangat menarik untuk dikaji dan diteliti, di tengah harapan untuk mengelola konflik yang terjadi di Papua dengan cara-cara yang lebih baik, demokratis dan dapat diterima oleh semua kekuatan sosial politik. Kajian berikut

ini akan menelaah lebih lanjut, faktor-faktor utama yang menjadi penentu di dalam integrasi sosial di Fakfak, bagaimana proses yang terjadi hingga tantangan yang dihadapi saat ini.

Integrasi Sosial Baru: Suatu Diskursus Teoritis

Secara umum teori utama yang dipilih sebagai *grand theory* dalam memahami fenomena yang menjadi *locus* penelitian ini, yaitu teori integrasi sosial (*sosial integration*). Dalam kajian sosiologi, teori integrasi sosial merupakan bagian dari paradigma fungsionalisme struktural yang diperkenalkan Talcot Parson (1927-1979). Paradigma ini mengandaikan bahwa pada dasarnya masyarakat berada dalam sebuah sistem sosial yang mengikat mereka dalam keseimbangan (*ekuilibrium*). Hal ini tercermin dari dua pengertian dasar integrasi sosial yaitu, *pertama*, pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu, dan *kedua*, menyatukan unsur-unsur tertentu dalam suatu masyarakat sehingga tercipta sebuah tertib sosial (Ritzer, 2009:258). Proses ini ingin mengintegrasikan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat, dengan cara menjembatani perbedaan-perbedaan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor teritorial/kultur, agama, kepentingan, kelas sosial dan sebagainya, dengan mengurangi kesenjangan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor tersebut.

Selama ini kajian tentang integrasi sosial sering dipengaruhi oleh wacana kekuasaan tentang penyatuan dalam sebuah kekuatan identitas yang mengatasi perbedaan. Suatu tafsir sosial yang menonjolkan adanya penundukan terhadap kekuatan-kekuatan minoritas untuk tunduk dan menyatu di bawah kuasa identitas yang mayoritas. Maka sebagai kelanjutan dari cara pandang yang demikian itu, dikedepankan konsep asimilasi, yaitu identitas dan kebudayaan yang minoritas lebih diharapkan menyatu dengan identitas budaya yang mayoritas. Dalam studinya tentang Integrasi nasional,

Nazaruddin Syamsudin (1989) menyebutkan bahwa integrasi sosial adalah bagian dari konsep integrasi nasional yang pada dasarnya mencakup dua persoalan mendasar. *Pertama*, bagaimana membuat rakyat tunduk dan patuh pada tuntutan dan kepentingan bersama yakni berbangsa dan bernegara. *Kedua*, bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mengatur tingkah laku positif masyarakat atau individu-individu yang ada di dalamnya. Pandangan Nazaruddin, sejatinya mewakili banyak ilmuwan politik pada zamannya yang memandang negara sebagai satu-satunya entitas sosial politik yang harus dirawat eksistensinya, meskipun dalam proses tersebut secara tidak terelakkan mengabaikan keragaman dan perbedaan yang telah menjadi fakta sosial di Indonesia.

Sejak reformasi 1998 yang ditandai dengan demokrasi dan demokratisasi yang mendorong wacana keterbukaan, maka banyak ilmuwan mengkritik konsep integrasi sebagai bagian dari wacana kekuasaan yang cenderung dikuasai oleh tafsir negara. Secara sarkastis banyak ilmuwan dan peneliti memandang konsep integrasi sosial sebagai konsep ilmu sosial yang telah kehilangan konteksnya di tengah tuntutan demokrasi dan penghormatan terhadap perbedaan. Setiap studi yang mempromosikan integrasi sosial dianggap sebagai aktivitas teoritis yang tidak menarik dan pro status quo. Padahal menurut penulis, yang diperlukan oleh ilmuwan sosial adalah melepaskan sebuah konsep keilmuan dari tafsir kekuasaan yang selama ini menghegemoninya. Sebagaimana ditegaskan oleh sosiolog Heru Nugroho (2011:178), para ilmuwan sosial dewasa ini memerlukan perimbangan wacana publik secara seimbang dengan cara ikut serta dan terlibat dalam diskursus tentang keragaman, tanpa harus ada pemaksaan dari negara terhadap masyarakat sipil.

Tulisan ini mencoba mendudukan kembali konsep integrasi sosial dalam alam pikiran demokratis dengan melihat perbedaan sebagai realitas politik yang harus dikelola dengan cara-cara yang demokratis. Pandangan demokratis terhadap konsep

integrasi sosial menekankan pentingnya relasi yang setara dan saling menguntungkan. Biku Parekh (2008:84-87) menyebutkan bahwa proses integrasi sosial dalam sebuah masyarakat demokratis mensyaratkan tiga hal. *Pertama*, adanya kesepakatan dari sebagian besar anggotanya terhadap nilai-nilai sosial tertentu yang bersifat fundamental dan krusial. *Kedua*, sebagian terhimpun dalam berbagai unit sosial dan saling mengawasi dalam aspek-aspek sosial yang potensial. Hal ini untuk menjaga terjadinya dominasi dan penguasaan dari kelompok mayoritas atas minoritas. *Ketiga*, terjadi saling ketergantungan diantara kelompok-kelompok sosial yang terhimpun di dalam suatu masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial secara menyeluruh.

Modal utama lahirnya integrasi sosial dalam masyarakat demokratis adalah adanya kepercayaan (*Trust*). Kepercayaan membuat kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat tidak akan terlibat dalam aksi kekerasan kepada yang lain. Integrasi sosial juga membutuhkan pengakuan (*recognition*) terhadap absahnya perbedaan dan hak bagi perbedaan itu untuk hidup dalam masyarakat. Dengan adanya pengakuan seperti itu, maka lahir sikap yang toleran terhadap perbedaan. Syarat penting lainnya seperti disebut Parekh adalah *a moral contract* (Parekh, 2008). Kontrak moral adalah ketaatan terhadap nilai-nilai yang menjadi *platform* bersama dalam masyarakat, sehingga membentuk semacam kepemilikan bersama atas nilai-nilai tersebut. Ia menjadi titik temu perbedaan yang harus ditaati dalam sebuah masyarakat untuk menjamin tegaknya perdamaian. Ketaatan pada *moral contract* akan menempatkan masyarakat pada kondisi yang setara. Sebab hanya masyarakat yang setara yang dapat membentuk masyarakat tanpa diskriminasi.

Proses integrasi sosial dalam sebuah masyarakat demokratis tentu tidak menafikkan adanya konflik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari fenomena sosial dan perubahan. Sebab konflik, seperti yang

dijelaskan Ralf Dahrendorf adalah fenomena sosial yang selalu hadir (*inherent omni presence*) dalam setiap masyarakat manusia (Ritzer, 2009). Akan tetapi, potensi konflik tidak harus dihadapi dengan cara-cara kekuasaan yang hegemonik. Dengan kata lain masyarakat dan negara perlu mengelola berbagai potensi konflik yang ada dengan cara-cara yang dapat diterima oleh semua pihak. Cara yang sering ditawarkan para teoritis konflik adalah *pertama*, dengan membangun konsensus yang mempertemukan “kepentingan-kepentingan” kelompok yang bertikai tersebut ke dalam sebuah tatanan kekuasaan yang dapat mengurangi perbedaan (Maswadi Rauf, 2000:15). *Kedua*, melakukan usaha yang serius untuk mendorong penguatan kembali nilai-nilai kebersamaan yang disebut Parekh (2008:87) sebagai “kontrak moral” antar-kelompok dan individu dalam sebuah masyarakat majemuk.

Sesungguhnya dalam konteks berbangsa dan bernegara memiliki banyak contoh atau *best practise* tentang bagaimana masyarakat pada aras lokal berhasil menciptakan konsensus bersama dalam memperkuat integrasi sosial dan menciptakan harmoni dan perdamaian. Kasus masyarakat Fakfak yang diangkat dalam kajian ini menunjukkan bahwa masyarakat berhasil memperkuat integrasi sosial dengan cara mengelola perbedaan-perbedaan yang ada dengan mengedepankan moralitas agama dan budaya. Nilai-nilai agama dan budaya menjadi sumber nilai yang secara tidak langsung menjadi *habitus* dalam kehidupan masyarakat Fakfak. *Habitus* sebagaimana dijelaskan Pierre Bourdieu (1977:72) bahwa struktur mental atau kognitif yang dengan sendiri manusiaberhubungan dengan dunia sosial yang kompleks. Individu menggunakan *habitus* untuk berhubungan dengan realitas sosial karena ia telah dibekali dengan serangkaian skema terinternalisasi yang digunakan untuk mempersepsi, memahami, mengapresiasi dan mengevaluasi dunia sosial. Seperti benar-salah, baik-buruk, berguna-tidak berguna, terhormat-terhina (Mohammad Adib, 2012:97).

Praxis dari kerangka konseptual Bourdieu tentang *habitus*, memiliki relevansi untuk menjelaskan fenomena harmoni sosial yang terbentuk pada masyarakat Fakfak karena sebuah masyarakat yang teratur dan harmonis merupakan perwujudan dari adanya sistem nilai yang dianut oleh masyarakat yang cenderung menghindari konflik dan adanya ruang sosial yang mendukung untuk terwujudnya kondisi tersebut. Integrasi sosial yang terjadi di Fakfak merupakan produk kultural yang telah terbingkai dalam modal kultural masyarakat, seperti adanya tradisi *Satu Tungku Tiga Batu*, yang tanpa disadari menjadi *habitus* dalam pikiran dan tindakan masyarakat. Hal ini ditambah dengan keberadaan kepemimpinan adat yang kuat, struktur pemerintahan lokal yang cenderung akomodatif pada perbedaan dan adanya dukungan berbagai kelompok sosial lain terhadap pelestarian nilai-nilai kultural masyarakat Fakfak ke dalam ruang politik, ekonomi, dan budaya.

Mengenal Lebih Dekat tentang Fakfak: Negeri Damai di Papua.

Fakfak adalah sebuah kabupaten yang terletak di bagian leher dari “kepala burung” Pulau Papua yang sering digambarkan seperti seekor Burung Kasuari raksasa yang sedang duduk. Kabupaten Fakfak yang luas meliputi 14,320 Km², terletak di Propinsi Papua Barat yang merupakan hasil pemekaran dari Propin Papua berdasarkan UU No 40 tahun 1999.

Meskipun keberadaan Fakfak kurang diketahui publik, akan tetapi wilayah ini merupakan salah satu kabupaten tertua di Papua, dibentuk pertama kali bersamaan dengan pembentukan delapan kabupaten lainnya pada awal integrasi Papua dengan Indonesia. Pada era kolonialisme Belanda, Fakfak merupakan salah satu daerah penting yang bersama Manokwari telah ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai satu dari dua wilayah *Afdelling* di Pulau Papua. Bahkan bila ditarik jauh ke belakang, posisi Fakfak telah menjadi beranda depan Papua yang paling awal membangun interaksi

dengan dunia luar. Tidak mengherankan bila sejak abad ke-13, Fakfak telah disebut dalam beberapa sumber sejarah. Sebagaimana tercantum dalam Kitab *Negara kertagama* yang ditulis oleh Pujangga Mpu Prapanca tahun 1365, khususnya dalam Kidung 13 dan 14 yang secara khusus memuat nama-nama daerah yang berada di bawah kedaulatan Majapahit. Salah satu daerah di antaranya adalah Wwanin dan Sran;

"I kang sakanusa-nusa Butun, banggawai Kuni Ggaliyaomwan i(ng) salamba Sumba Solot Muar muwah tigang i wanda Ambwan Athawa Maloko Wwanin ri Sran in Timur ning angeka nusatur..." (J.F. Onim, 2007)

Para sejarawan Belanda seperti Kern (1929), Krom dan Rouffaer (1930) berpendapat bahwa yang dimaksud "Wwanin" dalam tulisan Prapanca tersebut adalah Jazirah Onin yang terletak di Pantai Barat Kokas (Kern, 1926:417). Catatan tersebut selain sering digunakan sebagai klaim sejarah dan pengakuan atas hubungan historis Papua dengan wilayah Nusantara lainnya, juga menjadi penanda penting bahwa sejak abad ke-13 masyarakat Fakfak telah membangun perjumpaan dengan beragam budaya lain yang datang dari luar. Beberapa etnis pendatang seperti dari Arab, Sulawesi, dan Seram diketahui telah mendiami Fakfak sejak abad ke-17 dan 18. Fenomena ini sekaligus menjadi awal dari pembentukan watak keterbukaan (*cosmopolit*) masyarakat Fakfak yang terus berkembang hingga persentuhan dengan peradaban modern yang ditandai dengan masuknya agama dan kebudayaan luar.

Secara geografis, posisi Fakfak sangat strategis karena menghadap langsung ke Maluku, laksana sebuah pintu gerbang yang menyambut mereka yang akan berkunjung ke tanah Papua. Letaknya yang strategis dengan pelabuhan laut terbaik, memudahkan kapal dagang dari berbagai negeri dapat bersandar dalam berbagai jenis cuaca. Tidak mengherankan bila sejak abad ke-14 Fakfak telah menjadi wilayah terdepan di Papua yang telah dikunjungi oleh orang

luar dari berbagai daerah dengan beragam kepentingan. Ada yang berkunjung untuk kepentingan ekonomi, ekspansi politik, pengambilan budak hingga penyebaran agama (Onim, 2007). Terdapat lebih dari 14 suku bangsa hidup di Fakfak, terdiri bangsa pribumi (Papua) dan pendatang yang berasal dari Maluku, Sulawesi, Jawa, dan Sumatera. Agama Islam merupakan agama mayoritas di Fakfak, setelah itu agama Kristen dan Katolik. Akan tetapi, berbagai perbedaan tersebut tidak memicu konflik atau ketegangan antara agama, etnis, dan budaya. Bahkan hubungan sosial antarmasyarakat terjadi dalam relasi yang harmonis dan damai.

Cristian Warta menyebut Fakfak sebagai salah negeri paling aman di Papua. Berbagai kelompok etnis dan agama yang hidup di sini berhasil mempertahankan harmoni dan perdamaian, meskipun wilayah Papua lainnya sering dilanda konflik dan kekerasan (Warta, 2008). Berdasarkan catatan kepolisian setempat sejak awal reformasi yang menjadi penanda utama gejolak sosial politik di Papua, di Fakfak baru terjadi dua peristiwa kekerasan. Peristiwa *pertama* terjadi pada tahun 2000, ketika terjadi bentrokan antara masa yang menyatakan mendukung kemerdekaan Papua dan kelompok masyarakat yang mendukung NKRI. Peristiwa *kedua* adalah kerusuhan komunal antara etnis Seram dari Maluku dan Etnis Ayamaru dari Sorong. Kedua peristiwa tersebut berhasil diredam oleh masyarakat Fakfak melalui dialog kultural yang disebut "*dudu tikar*". Sehingga eskalasi konflik dapat diredam dan proses pemulihan keamanan dan ketertiban dapat berlangsung lebih cepat.

Agama dan Budaya sebagai *Habitus* dalam Integrasi Sosial.

Pada dasarnya harmoni dan perdamaian yang terjadi Fakfak merupakan pengalaman historis yang dibentuk dari akulturasi antara kekuatan agama dan budaya. Perjumpaan agama Islam sejak abad ke 16 dan Kristen serta Katolik pada abad ke-19 dengan tradisi dan budaya Fakfak melahirkan sejumlah nilai

dan norma sosial yang mengikat masyarakat Fakfak dalam keseimbangan sosial (Onim, 2007). Salah satu yang terpenting adalah filosofi dan kearifan lokal *Satu Tungku Tiga Batu*, sebagai lambang harmoni sosial di antara masyarakat. Secara sederhana filosofi *Satu Tungku Tiga Batu* adalah gambaran kultural tentang persaudaraan masyarakat Fakfak yang melintasi perbedaan identitas agama dan budaya. Pada konstruksi tradisional masyarakat Fakfak, *Satu Tungku Tiga Batu* menggambarkan keseimbangan, ibarat satu tungku yang ditopang oleh tiga batu saat memasak makanan oleh orang-orang zaman-zaman dahulu. Tanpa tiga kaki dari batu, tungku tersebut tidak akan stabil dan mengakibatkan masakan akan mudah tumpah. Tiga batu ini diibaratkan sebagai tiga agama besar yang berada di Fakfak yaitu agama Islam, Katolik, dan Protestan (Iribaram, 2011). Pada pemikiran masyarakat adat Fakfak jika tiga kaki dari batu itu stabil, maka semua persoalan dapat diatasi dengan baik, sehingga implementasi dari filosofi satu tungku tiga batu dimaknai bukan saja dalam kehidupan beragama, tetapi menjangkau hingga semua aspek kehidupan dalam masyarakat.

Beberapa praktik sosial yang melambangkan toleransi dan kerukunan antarumat beragama dapat dilihat pada seremoni penyambutan Salib Tuhan Yesus yang melibatkan semua kelompok agama di Fakfak. Demikian pula pembangunan rumah-rumah ibadah yang dilakukan secara bersama-sama dengan tradisi *baku bantu* atau gotong-royong di antara umat Islam dan Kristen. Tidak jarang seorang Kristen menjadi ketua pembangunan Masjid, dan juga sebaliknya. Mereka menganggap agama yang mereka anut bukanlah alasan untuk memisahkan ikatan kekeluargaan dan persaudaraan di antara mereka. Maka dengan mudah dapat ditemukan sebuah keluarga yang terdiri dari ketiga agama; Islam, Kristen, dan Katolik. Sebagaimana dituturkan oleh Bapak Simon Hindom sebagai berikut:

“Di keluarga saya, delapan bersaudara, ada yang menjadi Kristen, ada yang Islam, dan

Katolik. Ada saudara saya haji, ponakan saya bahkan ada yang jadi pastor. Dalam tradisi kami di sini, sudah terbiasa berbagi agama, asalkan ikhlas dan taat. Jadi, misalnya karena pernikahan seorang perempuan terpaksa menjadi mualaf. Maka, nanti salah satu anaknya disarankan ikut agama Kristen atau Katolik. Ini demi kebersamaan”. (wawancara dengan Simon Hindom, 28 Oktober 2013)



Gambar 1

- Kerukunan Umat Beragama di Fakfak
Keterangan Gambar Mulai dari Atas ke Bawah:
1. Keterlibatan Umat Islam pada Penjemputan Salib
 2. Arsitektur Masjid Tua Pattimburk yang menyerupai Gereja
 3. Arsitektur Gereja Tua Danaweria yang menyerupai Masjid

Satu Tungku Tiga Batu merupakan hasil akulturasi antara adat dan agama dalam masyarakat Fakfak yang melahirkan nilai-nilai toleransi, kerukunan dan kesediaan untuk menerima perbedaan. Melalui kearifan lokal tersebut berbagai sengketa dan pertentangan dalam masyarakat Fakfak selalu diselesaikan dengan cara-cara dialogis atau yang dikenal dengan istilah *dudu tikar*. Pada tradisi *dudu tikar*, semua masalah harus diselesaikan secara damai dan kekeluargaan karena berakar dari filosofi, yaitu *Idu-idu*, *Mani Nina*, dan *Yoyo*. *Idu-idu* adalah pandangan bahwa semua orang Fakfak harus membangun cinta kasih di antara mereka. Oleh karena itu, semua masalah harus diselesaikan dengan menanggalkan emosi dan menumbuhkan semangat cinta kasih yang menjadi dasar dari persaudaraan sejati. Sedangkan *Mani Nina* adalah pandangan bahwa tujuan hidup seseorang di dunia ini adalah untuk menciptakan perdamaian; sehingga bagi masyarakat Fakfak, hanya orang-orang yang dapat menjaga perdamaian di dunia ini yang memperoleh kedamaian di alam sesudah mati (akhirat). Adapun *Yoyo* adalah pandangan tentang kerukunan yang menjadi tanggung jawab semua orang Fakfak. Tradisi *dudu tikar* adalah upaya untuk menjaga nilai-nilai tersebut agar masyarakat Fakfak dapat terus hidup penuh cinta, rukun, dan damai dengan sesama saudaranya.

Fenomena masyarakat Fakfak memperlihatkan bahwa integrasi sosial yang melintasi batas-batas agama dan etnis dapat terjadi dengan baik bila dibingkai dalam pemahaman kultural dan religiositas masyarakat setempat. Nilai-nilai agama dan budaya menjadi faktor determinan yang menopang harmoni dan perdamaian masyarakat Fakfak. Fenomena ini menunjukkan bahwa agama dan budaya -meminjam istilah antropolog Amerika Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski (1953)- telah menjadi *Cultural-Determinism* bagi masyarakat setempat, yaitu ketika dinamika sosial masyarakat ditentukan oleh nilai-nilai kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.

Sebenarnya hubungan antara agama dengan kebudayaan merupakan sesuatu yang ambivalen. Agama dan budaya mempunyai independensi masing-masing, tetapi keduanya memiliki wilayah yang dapat saling tumpang-tindih. Akan tetapi, kenyataan tersebut tidak selalu menghalangi kemungkinan manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk budaya atau sebaliknya; sehingga dalam masyarakat tertentu agama dan budaya dapat menyatu dan menjadi dua unsur penting yang berperan dalam mempengaruhi aktivitas masyarakat. Seperti kajian Max Weber (1958) tentang etika Protestan dan munculnya kapitalisme di Eropa Barat, ataupun kasus agama Sinto dan budaya disiplin pada masyarakat Jepang. Ketika ajaran agama masuk dalam sebuah komunitas yang berbudaya, akan terjadi tarik menarik antara kepentingan agama di satu sisi dengan kepentingan budaya di sisi lain. Proses akulturasi antara agama budaya lalu melahirkan serangkaian norma sosial yang disebut Piere Bourdieu (1983) sebagai *habitus* yang melahirkan praktik-praktik sosial yang toleran, harmonis, dan penuh persaudaran. *Habitus* itulah yang menjadi struktur mental atau kognitif yang dengannya orang-orang di Fakfak berhubungan dengan dunia sosial yang kompleks, dan terkadang mengandung bias kepentingan dan pragmatis.

Pelebagaan Nilai dan Proses Integrasi Sosial di Fakfak

Secara sosiologis sistem nilai dalam masyarakat dapat berjalan dan fungsional bila menjelma menjadi sistem sosial yang kuat dan melembaga (Soekanto, 2000). Pada perspektif reproduksi sosial, Bourdieu (Harker, 2009) menawarkan konsep *field* atau arena untuk menguji sebuah sistem nilai (*habitus*) dapat diterima, difungsikan, dan secara formal dapat diterapkan untuk mempengaruhi interaksi sosial serta memelihara keteraturan sosial. Pemikiran semacam ini mengandaikan bahwa arena sosial, ekonomi, dan politik dapat dipengaruhi (distrukturkan) oleh nilai dan norma atau sebaliknya arena tersebut yang

mempengaruhi (menstrukturkan) praktik-praktik sosial. Tradisi membutuhkan aktivitas ritual dan lembaga-lembaga adat untuk tetap mempertahankan eksistensinya. Bahkan lebih dari itu nilai-nilai budaya harus dapat berebut pengaruh dalam ruang-ruang politik dan ekonomi yang seringkali berjalan dalam logika yang kontradiktif.

Pada kasus masyarakat Fakfak proses pelembagaan nilai dan norma dapat ditemukan pada dua bentuk; *pertama*, semangat agama keluarga yang melahirkan *Satu Tungku Tiga Batu* yang kemudian diadopsi sebagai spirit dalam hampir semua aktivitas sosial, keagamaan, politik bahkan ekonomi. Inilah yang disebut norma sosial yang melembaga (*ter-institutinalize*). Pemerintah Kab. Fakfak mengadopsi filosofi *Satu tungku tiga batu* sebagai asas untuk membentuk kehidupan politik di Fakfak yang seimbang dan harmonis sehingga muncul konsensus politik untuk membagi jabatan-jabatan politik berdasarkan kekuatan-kekuatan agama dan etnis. Misalnya, bila bupati adalah seorang Muslim, maka wakil bupati harus berasal dari kalangan Kristen atau Katolik. Demikian juga pada jabatan-jabatan SKPD dan birokrasi daerah, termasuk rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) juga memberi tempat kepada marga-marga asli orang Fakfak dan para pendatang.

Selain itu, keseimbangan juga di terapkan dalam masalah-masalah ekonomi sehingga tidak terlalu dikuasai oleh etnis pendatang. Pembangunan ekonomi di Fakfak didorong untuk membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat asli Fakfak sehingga tidak tertinggal dari etnis pendatang. Mereka diberi hak monopoli untuk memiliki perkebunan-perkebunan Pala di seluruh Fakfak. Pala menjadi komoditi unggulan yang dikuasai orang-orang Fakfak sejak dahulu karena di tanam di atas tanah-tanah ulayat yang luas. Akan tetapi, untuk memasarkan biji-biji Pala tersebut masyarakat Fakfak bergantung pada pembeli lokal yang biasanya berasal dari etnis pendatang, Cina, Arab, dan Bugis-Makassar. Untuk memberi kesempatan kepada masyarakat

asli Fakfak terlibat dalam aktivitas ekonomi, pemerintah juga menyediakan tempat khusus bagi masyarakat lokal untuk berdagang di Pasar Tumburuni Fakfak. Mereka diberi lapak-lapak untuk berjualan berbagai produk pangan lokal dan buah-buah musiman di lantai satu pasar tersebut. Setidaknya kebijakan ini dapat menghindari kecemburuan sosial akibat praktik ekonomi yang hanya dikuasai kelompok pendatang.

Di seluruh Papua, pasar bukan saja menjadi tempat aktivitas ekonomi, tetapi juga telah menjadi arena kontestasi identitas, lokal, dan pendatang. Sering terjadi konflik dan kekerasan yang bermula dari pasar yang dianggap sebagai simbol dominasi. Orang-orang Papua yang hanya dapat membuka lapak di pinggir jalan memandang dengan cemburu orang Bugis, Makassar, dan Jawa yang menguasai pasar-pasar di Papua. Maka penting untuk memastikan bahwa masyarakat asli Papua juga memiliki akses dan kekuasaan terhadap pasar untuk menunjukkan bahwa sebetulnya mereka adalah penguasa di pasar dan bukan sekedar *jongos* dari majikan yang entah datang darimana. Pemerintah Fakfak menyadari situasi tersebut dan membuat kebijakan untuk memberi hak kepemilikan kepada para pedagang lokal di Fakfak untuk menempati tempat khusus dan strategis di Pasar Tumburuni Fakfak. Hal ini mengurangi potensi konflik sosial karena kecemburuan ekonomi antara masyarakat asli dan pendatang.

Kedua, proses pelembagaan nilai dalam bentuk yang formal dan terorganisir dapat ditemukan pada sejumlah organisasi sosial yang menjalankan fungsi pengendalian sosial. Lembaga sosial yang demikian sebagian dapat ditemui pada sejumlah organisasi formal baik yang telah hadir sejak dahulu, maupun yang baru dibentuk untuk menjaga dan mengawasi agar praktik-praktik sosial di Fakfak tetap berada dalam kerangka nilai dan norma lokal yang telah hidup dalam masyarakat. Lembaga sosial dimaksud adalah tujuh lembaga adat Pertuanan (kerajaan) yang telah eksis sejak beberapa abad yang lampau, Lembaga Adat Baham-

Mata dan Pengadilan Adat yang didirikan pada tahun 2007 dan sejumlah organisasi sosial lintas kewargaan seperti Forum Komunikasi Antar-Umat Beragama (FKUB) dan Paguyuban Etnis Nusantara yang terdiri dari berbagai etnis lokal maupun pendatang yang mendiami Fakfak. Lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut memiliki misi yang sama, yakni menjaga agar hubungan sosial antara agama, etnis, dan budaya di Fakfak tetap berjalan harmonis dan damai. Mereka berfungsi sebagai pengendali sosial dan memastikan bahwa hubungan sosial dalam masyarakat tidak menimbulkan konflik. Bahkan lembaga adat seperti pengadilan adat memegang kunci sebagai resolusi konflik melalui kewenangannya untuk menangani sengketa-sengketa adat, hak ulayat, pelanggaran susila, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga penghinaan agama. Beberapa kasus seperti perkelahian antarkampung, polisi langsung menyerahkan kepada Pengadilan Adat untuk diselesaikan secara adat. Proses penyelesaian konflik secara kultural tersebut lebih mudah diterima oleh masyarakat adat karena dianggap lebih memuaskan dibandingkan penyelesaian melalui mekanisme formal di pengadilan negeri.

Apa yang terjadi di Fakfak menunjukkan bahwa untuk memperkuat integrasi sosial, masyarakat membutuhkan sistem nilai yang kuat dan melembaga yang menjadi dasar bagi semua aktivitas sosial. Sistem nilai tersebut harus memiliki akar kultural yang kuat, sehingga berpengaruh terhadap semua bidang kehidupan, termasuk berbagai kekuatan sosial politik yang menguasai arena sosial. Selanjutnya untuk menjamin nilai-nilai fundamental tersebut tetap hidup dalam praktik sosial, maka masyarakat memerlukan lembaga-lembaga sosial yang kuat yang dapat berfungsi maksimal dalam pengendalian konflik. Setiap perilaku yang menyimpang langsung diluruskan sehingga sistem sosial akan terus berada dalam keseimbangan (*social equilibrium*).

Masa Depan Integrasi Sosial di Tengah Perubahan Sosial di Papua.

Masyarakat Fakfak dan segenap kebudayaannya adalah fenomena sosial yang dinamis dan akan terus mengalami perubahan sesuai konteks ruang dan waktu. Setiap saat nilai-nilai budaya yang konvensional akan menghadapi tantangan, benturan bahkan juga kontestasi dengan nilai-nilai yang lain yang datang dari luar. Ataupun nilai-nilai baru yang muncul dari dalam masyarakat sebagai konsekuensi dari proses perubahan itu sendiri. Hal ini dapat diidentifikasi beberapa persoalan sebagai tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat Fakfak.

Pertama, Penyelesaian berbagai masalah di Papua seperti isu politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum yang belum tuntas, diyakini secara struktural maupun kultural akan terus menekan masyarakat Fakfak. Sebagai salah satu kabupaten di Propinsi Papua Barat, masyarakat Fakfak tidak dapat menghindar dari berbagai problematika yang terjadi di kota-kota besar seperti Jayapura dan Manokwari dan berpengaruh ke banyak daerah di wilayah Papua lainnya. Isu-isu politik seperti separatisme dan otonomi khusus Papua turut membelah masyarakat dalam kelompok yang saling bertentangan. Kehadiran kelompok-kelompok yang semakin militan dalam memperjuangkan hak-hak politik Papua di Fakfak seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Komite Nasional Pemuda Papua Barat (KNPPB) pimpinan Arnoldus Koncu, dan kelompok yang berlawanan seperti Barisan Merah Putih pimpinan Islamil Bauw, serta milisi-milisi sipil yang disponsori aparat keamanan dalam konfliknya dengan kekuatan-kekuatan pro-kemerdekaan Papua merupakan tantangan yang tidak mungkin dapat diabaikan. Sementara pemberlakuan Otsus dengan segala implikasinya dan pembangunan yang belum melahirkan kesejahteraan masih menjadi pertanyaan tentang kapan Papua dapat bangkit dari kemiskinan dan keterbelakangan.

Kedua, Potensi konflik keagamaan yang diintrodusir melalui isu Islamisasi dan radikalisasi agama yang sedang berlangsung di Papua juga menjadi tantangan di Fakfak. Bersamaan dengan membanjirnya transmigran dari berbagai daerah di Indonesia ke Papua, bukan saja meningkatkan jumlah kelompok pendatang, tetapi secara dramatis juga menambah jumlah pemeluk Islam di Papua. Perubahan demografis dengan meningkatnya populasi umat Islam secara signifikan, ternyata dirasakan sebagai ancaman serius bagi sebagian besar masyarakat Kristen Papua. Sebab bagi sebagian gerakan-gerakan pro kemerdekaan, Islamisasi secara tidak langsung dianggap sebagai proses Indonesianisasi (Warta, 2011).

Propaganda ini pada dasarnya bukan merupakan sesuatu yang baru karena sebagaimana dicatat Rutherford (2006: 156). Sejak lama pemerintah Kolonial Belanda sudah pernah mengingatkan masyarakat Papua bahwa bila Indonesia menguasai New Guinea Barat, pemerintah Indonesia akan memaksa penduduk Papua untuk memeluk Islam. Dampaknya adalah Islamisasi menjadi momok yang menakutkan, bukan saja karena dianggap akan merusak identitas religi Kristen Papua, tetapi lebih jauh dipahami sebagai serangan terhadap nasionalisme Papua yang ditegakkan di atas identitas etnik dan keagamaan. Islamisasi secara politis dipahami sebagai bagian tak terpisahkan dari proses Indonesianisasi, sehingga ekspansi dakwah Islam berarti pula penaklukan Papua oleh Indonesia.

Cara pandang yang demikian memperoleh momentum dengan kehadiran kelompok-kelompok Islam radikal yang mulai muncul di Papua sejak berakhirnya konflik sosial di Ambon. Menurut catatan International Crisis Group (2008), kelompok keagamaan seperti Lasykar Jihad, Gerakan Salafi, dan Hizbut Tahrir (HTI) mulai mengembangkan gerakan dakwahnya di Papua. Jaringan HTI berkembang di beberapa kota yang memiliki perguruan tinggi, seperti di Sorong, Manowari, dan Jayapura. Sedangkan di wilayah Fakfak gerakan HTI

diwakili oleh organisasi keagamaan yang disebut Al-Fatih Kaafah Nusantara (AFKN).

AFKN adalah sebuah organisasi dakwah yang didirikan oleh Ustadz Mohamed Zaaf Fadzlan Garamatan, Seorang ustadz terkemuka yang juga merupakan warga asli Fakfak. Gerakan AFKN sebetulnya berpusat di Bekasi Jawa Barat, tetapi menjadikan Fakfak sebagai salah satu pusat gerakannya di Papua. AFKN memiliki misi untuk melanjutkan proses Islamisasi di Papua yang sempat terhenti oleh misi *zending* dan kolonialisme Belanda. Untuk mendukung misi tersebut, AFKN memberi pendidikan gratis bagi ratusan murid Papua, sebagian besar disekolahkan di pesantren-pesantren di Jawa, Sumatra, dan Sulawesi Selatan. Bahkan banyak juga yang mendapat beasiswa dari AFKN untuk melanjutkan studi ke berbagai perguruan tinggi yang tersebar di Sulawesi, Jawa, dan Sumatera. AFKN juga membantu warga Papua yang tidak mampu untuk menunaikan ibadah naik haji ke Mekah, sebagian di antaranya adalah kepala-kepala suku dan pemimpin warga dari berbagai tempat di Papua. Bagi beberapa kelompok Kristen di Papua, keberadaan ormas Islam dengan dakwahnya yang semakin marak belakangan ini telah menjadi ancaman bagi Kristen yang mayoritas (ICG, 2008).

Kontestasi yang demikian menjadikan hubungan antaragama di hampir seluruh tempat di Papua, termasuk Fakfak menjadi tegang. Padahal sebagaimana telah dibahas dalam bagian-bagian sebelumnya bahwa masyarakat Fakfak merupakan komunitas multi-agama di Papua yang telah berhasil meletakkan dasar-dasar toleransi yang kuat yang berakar pada kultur dan adat-istiadat masyarakat setempat. Akan tetapi, Fakfak tidak dapat terlepas lagi dari incaran kekuatan eksternal, di mana ormas-ormas Islam melihat Fakfak adalah pintu masuk untuk memulai kerja dakwah Islamisasi Papua. Sedangkan bagi pihak Kristen, Fakfak adalah duri dalam daging karena akan membahayakan eksistensi kristen di Papua. Oleh karena itu, Fakfak yang berpenduduk mayoritas Muslim akan terus menerus ditunjuk sebagai dasar

klaim tentang kehadiran Islam yang semakin kuat di Papua.

Sejalan dengan fenomena radikalisme di kalangan Islam, belakangan juga muncul gereja-gereja kristen yang dianggap cukup ekstrim dalam kegiatan misinya. Sebagaimana dicatat ICG (2008), secara umum ada dua kelompok gereja di Papua yang dikaitkan dengan ekstremisme atau sikap radikal terhadap Islam, yaitu Gereja Bethel dan anak cabangnya Gereja Bethany. Para pemimpin agama Kristen di Papua juga menganggap kelompok ini sebagai gereja Kristen yang paling radikal di antara pelbagai gereja Kristen di Papua. Sementara itu pengaruh misionaris Pantekosta dan gerakan Karismatik juga semakin agresif dan tidak dapat dianggap remeh. Menurut Warta (2009) para pendeta dari kelompok gereja ini sering memperlihatkan ketidaksukaannya kepada pendatang Muslim dengan cara-cara yang frontal di depan publik.

Untuk itu, pertanyaan fundamental saat ini adalah bagaimana mempertahankan norma dan kearifan lokal di Fakfak agar tetap fungsional di tengah berbagai tekanan dan proses perubahan sosial yang seringkali tidak dapat dicegah. Hal ini dikarenakan setiap kehidupan manusia akan mengalami perubahan, baik mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola perilaku, perekonomian, lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, interaksi sosial, dan lainnya. Perubahan sosial terjadi pada semua masyarakat dalam setiap proses dan waktu dengan dampak yang positif ataupun negatif. Beberapa kasus proses integrasi sosial melemah justru sejalan dengan semakin melemahnya nilai-nilai sosial yang selama ini berfungsi sebagai *crosscutting affiliation* dan *crosscutting loyalty* dalam sebuah masyarakat. sebagaimana kasus melemahnya tradisi *pela* dan *gandong* yang tidak dapat mengendalikan konflik sosial bernuansa agama di Ambon. Sebagian sosiolog percaya bahwa modernisasi yang melanda Indonesia (termasuk komunikasi dan budaya) menjadi salah satu penyebab bergesernya orientasi nilai budaya seperti

pela dan *gandong* yang bersifat kultural religius, melemah menjadi bersifat simbolik semata. Hal ini terutama di kalangan anak-anak muda yang tidak memiliki *cultural sense* terhadap kebudayaannya sendiri (Jhon Pieres, 2004: 169).

Masyarakat membutuhkan strategi bertahan dari globalisasi dan modernisasi yang membawa serta pengaruh-pengaruh buruk bagi eksistensi kebudayaan mereka. Maka masyarakat lokal seperti di Fakfak tentu tidak memiliki pilihan lain, selain melakukan penguatan nilai-nilai budaya yang selama ini telah mereka miliki. Kearifan lokal *Satu Tungku Tiga Batu* dengan segenap tradisi yang menyertainya seperti ritual *sambut salib*, tradisi *dudu tikar*, tradisi *baku bantu* dan lain sebagainya yang telah memperkuat integrasi sosial di sana harus terus dikembangkan dan diperkuat. Sudah saatnya nilai-nilai toleransi dan kerukunan di Fakfak secara formal dimasukkan kedalam peraturan-peraturan daerah (PERDA) yang secara formal mengatur kehidupan sosial di Fakfak; sehingga nilai lokal bukan saja mengikat secara kultural, tetapi lebih jauh memiliki kekuatan politik untuk menekan munculnya radikalisme agama maupun politik.

Cara lain masyarakat Fakfak perlu beradaptasi secara kreatif dan tujuannya agardapat menerima proses perubahan tanpa harus larut dalam perubahan itu sendiri, yaitu masyarakat perlu mengenali lingkungan strategisnya dan menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Studi ini menunjukkan bahwa masyarakat Fakfak mampu mempertahankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokalnya justru karena mereka membuka diri terhadap kebudayaan lain; sehingga berupa-rupa kebudayaan, ideologi, dan agama yang masuk ke Fakfak saling berinteraksi serta membentuk kebudayaan Fakfak saat ini. Kehadiran berbagai kelompok pendatang dari Maluku, Sulawesi, Arab, dan Cina sejak beberapa abad yang lalu justru telah memperkaya kebudayaan Fakfak. Sejalan dengan spirit keterbukaan, hal lain yang perlu dilakukan adalah melakukan transformasi kultural agar budaya-budaya

lokal selalu sesuai dengan semangat zaman. Itu artinya selain membuka diri pada perubahan, masyarakat juga dituntut untuk melakukan tafsir dan kontekstualisasi terhadap tradisi, budaya, dan adat istiadat yang mungkin dianggap tidak lagi sesuai dengan kehidupan saat ini. Hal ini bukan berarti meninggalkan adat dan kearifan lokal yang telah terbukti dapat merekatkan hubungan sosial dalam masyarakat Fakfak. Akan tetapi, lebih dari itu membuat nilai-nilai lokal tersebut selalu aktual dan sesuai dengan semangat zaman.

SIMPULAN

Dinamika sosial di Papua ternyata bukan hanya cerita tentang konflik dan kekerasan, tetapi juga tentang harmoni dan perdamaian yang masih dapat ditemui di wilayah-wilayah tertentu di Papua, sebagaimana yang terjadi di Fakfak-Papua Barat. Selama satu dekade terakhir, atau tepatnya sejak era reformasi 1998, masyarakat Fakfak berhasil menjaga wilayahnya untuk tidak jatuh dalam konflik dan anarkisme sebagaimana yang terjadi hampir di semua tempat di Papua. Agama dan budaya telah menjadi faktor determinan yang memperkuat integrasi sosial dalam masyarakat Fakfak yang majemuk. Akulturasi antara nilai-nilai agama dan budaya yang melahirkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antarmasyarakat yang berbeda agama, etnis, dan budaya. Nilai-nilai agama dan budaya menjadi *habitus* yang membentuk watak perdamaian yang mempromosikan harmoni dan perdamaian Fakfak. Pada kasus masyarakat kearifan lokal seperti *Satu Tungku Tiga Batu* dapat berfungsi sebagai *moral contract* dan sekaligus nilai bersama yang mengikat masyarakat Fakfak dalam satu keseimbangan sosial (*social equilibrium*). Kondisi ini memungkinkan masyarakat berintegrasi secara alami, tanpa ada proses penundukan dari kelompok mayoritas terhadap minoritas. Integrasi sosial yang demikian ini menjadi penanda integrasi sosial baru yang demokratis.

Akan tetapi, studi ini juga menemukan bahwa harmoni dan perdamaian pada

masyarakat Fakfak memerlukan penguatan terus-menerus karena rentan dengan berbagai isu. Seperti isu-isu politik, ekonomi, dan segala dinamikanya yang telah melahirkan kekuatan Pro-M dan Pro-NKRI di Fakfak. Hal ini membuktikan bahwa di masa depan kondisi sosial politik di Jayapura dan Manokwari akan selalu memiliki resonansi yang cukup untuk menggoyang perdamaian di Fakfak. Sedangkan isu radikalisme agama yang didukung oleh kehadiran kelompok-kelompok keagamaan yang radikal dengan jaringan yang semakin meluas dan tidak toleran pada perbedaan agama, seperti HTI, Lasykar Jihad, dan AFKN serta gereja-gereja ekstrim dari kalangan kharismatis dan Pantekosta merupakan tantangan juga harus dihadapi oleh masyarakat setempat.

Oleh karena itu, masyarakat Fakfak dan institusi-institusi sosial di sana perlu diperkuat untuk mempertahankan harmoni dan keragaman di tengah berbagai tekanan yang ada. Kearifan lokal *Satu Tungku Tiga Batu* dengan segenap tradisi yang menyertainya perlu diperkuat sehingga semakin memantapkan integrasi sosial di Fakfak. Sudah saatnya nilai-nilai toleransi dan kerukunan di Fakfak secara formal dimasukkan ke dalam kurikulum dan sistem pendidikan lokal bahkan bila perlu dimasukkan kedalam peraturan-peraturan daerah (PERDA) yang secara formal mengatur kehidupan sosial di Fakfak. Sehingga nilai-nilai lokal bukan saja mengikat secara kultural, tetapi lebih jauh memiliki kekuatan politik untuk menekan munculnya radikalisme agama maupun politik. Sejalan dengan itu, mungkin diperlukan semacam kreativitas untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi untuk melakukan transformasi sosial budaya agar nilai-nilai lokal tetap aktual di tengah berbagai tantangan perubahan. *Semoga!*

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Irwan (*edit.*). 2008. *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*. Sekolah Pascasarjana UGM dan Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

- Bertrand, Jacques. 2004. *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Cambridge University Press: New York.
- Bourdieu, Pierre. (1997). *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge University: United Kingdom.
- _____. 1991. *Language and Symbolic Power*. Harvard University Press: Massachusetts.
- Harker, Richard, dkk. 2009. *(Habitush x Modal)+Ranah=Praktik, Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. Jelasutra: Yogyakarta.
- Iribaram, Suprpto. 2011. *Satu Tungku Tiga Batu (Kerjasama Tiga Agama dalam Kehidupan Sosial di Fakfak)*. Tesis Magister pada Program Pascasarjana Antropologi Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- Nugroho, Heru. 1999. *Konstruksi Sara, Kemajemukan dan Demokrasi*, UNISIA, No.40/XXII/1999.
- Onim, J.F. 2006. *Islam dan Kristen di Tanah Papua*. Jurnal Info Media: Bandung.
- Parekh, Biku. 2008. *A New Politics of Identity*. Palgrave Macmillan: New York.
- _____. 2008. *Rethinking Multiculturalism, Keragaman Budaya, dan Teori Politik*. Kanisius: Yogyakarta.
- Pranawati, Rita (edit.). 2011. *Kebebasan Beragama dan Integrasi Sosial*. Center for Study of Religion and Culture (CSRC): Jakarta.
- Rauf, Maswadi. 2000. *Konsensus Politik Sebuah Penajagan Teoritik*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta.
- Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Rajawali Press: Jakarta.
- _____. dan Douglas J. Goodman. 2009. *Sociological Theory*, diterjemahkan oleh Nurhadi, "Teori Sosiologi; dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Modern". Kreasi Wacana: Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi, Suatu Pengantar*. Alumni: Bandung.
- Takwin, Bagus. 2009. "Proyek Intelektual Pierre Bourdieu: Melacak Asal-usul Masyarakat, Melampaui Oposisi Biner dalam ilmu Sosial", Pengantar dalam Richard Harker, (edit.), *(Habitush x Modal)+Ranah=Praktik, Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. Jelasutra: Yogyakarta.
- Varshney, Asutosh. 2002. *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India*. New Haven: Yale University.
- Warta, Cristian. 2006. "Perkembangan Masalah Agama di Papua: Sengketa antar Agama dan Pencegahan Konflik", dalam Fajar Ibnu Tufail (edit.), *Politik Identitas Pasca Orde Baru*, LKiS: Yogyakarta.
- Widjono, Muridan S. 2009. *Papua Road Map; Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. Yayasan TIFA: Jakarta.
- _____. 2009. "Dilema dan Refleksi Otsus; Sebuah Prolog", dalam Lamadi de Lamato, *Bola Liar Kegagalan Otsus*. La Keda Institute: Jayapura.